

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi untuk Tahun 2013–2018 yaitu

“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”

Yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- a. Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- b. Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan;
- c. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik;
- d. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan;
- e. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, dan untuk meningkatkan peran dan kinerja, profesionalisme serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maka perlu dirumuskan Visi dan Misi, yang ingin dicapai satu sampai lima lima tahun secara berkesinambungan. Dalam mencapai visi dan misi diperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

1. Visi Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi juga merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintahan harus dibawa agar dapat eksis, aspiratif, dan inovatif. Visi Inspektorat Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari misi Jawa Barat, terutama misi ketiga Provinsi Jawa Barat yaitu ***“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik”***, Inspektorat Provinsi Jawa Barat menetapkan visi sebagai berikut:

” Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

2. Misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Barat menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
- b. Meningkatkan peran pembinaan (konseling) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan optimal.

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Jawa Barat) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap tahun.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	3,000 poin
2	Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	10%
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	60%
		Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi	90%

		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	VTP
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	80%
		Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A
5	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	75%
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	100 % (Hijau)
		Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	75%
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	73 orang
		Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	20 orang
		Level kapabilitas Inspektorat	III

C. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan
	Total Anggaran	43.701.279.426
I	Belanja Tidak Langsung	17.803.394.426
II	Belanja Langsung	25.897.885.000
A.	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	19,041.740.000
1.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.	718.984.400
2.	Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan.	600.000.000
3.	Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian lainnya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan BPK RI	872.068.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota (EPPD).	800.000.000
5.	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	589.086.000
B.	Program Pemanjapan Otonomi Daerah dan sistem Administrasi Daerah	90.000.000
6.	Kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.	90.000.000
C.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	378.293.000

7.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan.	378.293.000
D.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	618.000.000
8.	Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	618.000.000
E.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.487.260.000
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	2.487.260.000
F.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	873.900.000
10.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	873.900.000
G.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.255.667.000
11.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat	2.255.667.000
H.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.000.000
12.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	54.000.000
I.	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	99.025.000
13.	Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	99.025.000